Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi (JURIMA)
Volume 6 Nomor 2, Agustus 2026
e-ISSN: 2827-8577; p-ISSN: 2827-8569, Hal 15-32
DOI: https://doi.org/10.55606/jurima.v6i2.7059
Available online at: https://journalshub.org/index.php/jurima

Pengaruh *Intergovernmental Revenue*, Belanja Daerah, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022-2024)

Putri Ani*, Tapi Rumondang Sari Siregar, Chandra Situmeang, Khairunnisa Harahap, Esa Setiana
Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara
Alamat: Jalan Willem Iskandar, Pasar V Medan Estate, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara, 20221.
*Korespondensi penulis: aniiiputrii.2121@gmail.com**

Abstract. *This research is motivated by the phenomenon of low fiscal independence in local governments, reflected in the high dependency on transfer funds from the central government, as well as fluctuations in the management of regional expenditures and assets that have not been optimized to improve financial performance. This condition triggers the urgency to analyze the extent to which the availability of external financial resources and the structure of regional spending can reflect the effectiveness of government financial governance. Therefore, this study aims to examine and analyze the influence of Intergovernmental Revenue, Regional Expenditure, and Local Government Size on Local Government Financial Performance in Regencies and Cities across North Sumatra Province for the 2022-2024 period. The research method employed is a quantitative approach. The population in this study includes 33 Regencies/Cities in North Sumatra Province, utilizing a saturated sampling technique over three years of observation, resulting in 99 units of observation. The data used are secondary data in the form of Budget Realization Reports (LRA) obtained through the official website of the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK). Data analysis was performed using multiple linear regression via SPSS 25 software.The results show that, partially, Intergovernmental Revenue and Local Government Size have a significant effect on local government financial performance, while Regional Expenditure does not show a significant effect. Simultaneously, these three variables significantly influence local government financial performance. These findings imply that local governments need to improve the optimization of Original Local Government Revenue (PAD) and expenditure efficiency to achieve more independent and sustainable financial performance in accordance with the principles of Stewardship Theory.*
Keywords: *Intergovernmental Revenue; Regional Expenditure; Regional; Government Size, Regional Government Financial Performance.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena rendahnya tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah yang tercermin dari tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, serta adanya fluktuasi dalam pengelolaan belanja dan aset daerah yang belum optimal dalam meningkatkan kinerja keuangan. Kondisi ini memicu urgensi untuk menganalisis sejauh mana ketersediaan sumber daya finansial eksternal dan postur belanja daerah mampu mencerminkan efektivitas tata kelola keuangan pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Intergovernmental Revenue*, Belanja Daerah, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2022-2024. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini mencakup 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dengan teknik pengambilan sampel jenuh selama tiga tahun pengamatan, sehingga diperoleh 99 unit observasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diperoleh melalui situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda melalui perangkat lunak SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara parsial *Intergovernmental Revenue* dan Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah,

Received: March 23, 2026; Revised: March 30, 2026; Accepted: April 07, 2026; Published: August 31, 2026.
* Corresponding author, e-mail addres

sementara Belanja Daerah tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini memberikan implikasi bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi belanja guna mencapai kinerja keuangan yang lebih mandiri dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip *Stewardship Theory*.
Keywords: *Intergovernmental Revenue; Belanja Daerah; Ukuran Pemerintah Daerah; Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.*

LATAR BELAKANG

Implementasi otonomi daerah di Indonesia menuntut kemandirian fiskal yang kokoh sebagai fondasi pembangunan regional. Namun, fakta empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung kontraktif. Data menunjukkan rasio kemandirian pada tahun 2022 sebesar 18%, meningkat menjadi 22% pada 2023, namun mengalami degradasi signifikan menjadi hanya 10% pada tahun 2024. Penurunan tajam ini mengindikasikan adanya dependensi fiskal yang masih tinggi terhadap pemerintah pusat.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh berbagai instrumen fiskal, salah satunya adalah *Intergovernmental Revenue*. Sebagai sumber pendanaan eksternal, dana transfer diharapkan mampu menutupi celah fiskal daerah, namun ketergantungan yang berlebih berpotensi menghambat inisiatif kemandirian ekonomi daerah. Berdasarkan penelitian terdahulu, Desky et al., (2023) mengenai variabel dana perimbangan menunjukkan bahwa penganggaran dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah serta penelitian yang dilakukan oleh Putri (2023) menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Aspek selanjutnya yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah Belanja Daerah. Menurut Bastian (2006 dalam Dilliana & Herdi, 2022), belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan secara adil dan merata sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi, khususnya dalam penyediaan pelayanan publik. Berdasarkan penelitian terdahulu, Amanda & Praptoyo (2023) di Provinsi Jawa Timur menemukan hasil yang berbeda, di mana belanja daerah justru berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja operasi melebihi target anggaran yang telah ditetapkan, sehingga menurunkan kinerja keuangan. Aspek terakhir

yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah Ukuran Pemerintah Daerah. Ukuran Pemerintah Daerah adalah hal yang memberikan informasi terkait seberapa besar atau seberapa kecil pemerintah daerah tersebut. Total aset pemerintah daerah sebagai ukuran bisnis untuk mengukur ukuran pemerintah daerah (Fauziah et al., 2023). Pemerintah daerah yang memiliki skala besar bisa berdampak positif pada operasional dan memberikan kemudahan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dewanti (2022) menyatakan bahwa dalam penelitian yang mereka lakukan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati et al., (2024) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Secara teoretis, hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat dijelaskan melalui *Stewardship Theory* dan *Agency Theory*. Dalam perspektif *stewardship*, pemerintah daerah dipandang sebagai pengelola yang bertindak demi kepentingan publik dan berupaya mencapai tujuan organisasi secara maksimal. Sementara itu, *agency theory* menyoroti pentingnya transparansi untuk mengurangi asimetri informasi antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Penyelarasan kedua teori ini menjadi landasan dalam memastikan bahwa setiap sumber daya yang dikelola memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, Urgensi penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini penting dilakukan karena tingkat kemandirian keuangan daerah pada beberapa pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara masih tergolong rendah, yang tercermin dari nilai rasio kemandirian keuangan daerah yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum berjalan secara optimal. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kinerja keuangan daerah sekaligus menjadi dasar dalam upaya peningkatan kemandirian fiskal pemerintah daerah. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mendorong pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

KAJIAN TEORITIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi menyatakan bahwa pemerintah daerah sebagai agen bertindak atas nama masyarakat (*principal*) dan dapat dipercaya karena menyadari tugas mereka. Agen bertanggung jawab atas pengelolaan aset untuk meningkatkan pendapatan prinsipal (Ardelia et al., 2022 dalam Fadilah & Andriani, 2025). Pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan dengan sumber daya tambahan yang disediakan oleh kabupaten khusus Aulia & Rahmawaty (2020 dalam Fadilah & Andriani, 2025). Dalam konteks penelitian ini, teori keagenan menunjukkan bahwa pemerintah sebagai agen harus menetapkan strategi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai prinsipal. Masyarakat, sebagai prinsipal, mengharapkan kinerja yang baik dari pemerintah yang dapat dilihat dari laporan keuangan dan pelayanan yang baik. Kualitas laporan keuangan dan pelayanan ini tergantung pada strategi yang diterapkan oleh pemerintah. Jika pemerintah menunjukkan kinerja yang baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah (Thalib & Ekaningtias, 2019 dalam Fadilah & Andriani, 2025).

Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

Stewardship theory sering disebut sebagai teori pengelolaan (penatalayanan) (Davis and Donalson, 1991 dalam Dilliana & Herdi, 2022). Teori *Stewardship* didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seorang manajer tidak memiliki kepentingan individu, tapi lebih mengupayakan kepentingan dan keinginan prinsipal serta mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, memiliki integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain. *Stewards* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari *stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik (Raharjo, 2007 dalam Dilliana & Herdi, 2022). Menurut Putro (2013 dalam Dilliana & Herdi, 2022) teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah.

Kinerja Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah

Menurut Syamsi (1986) dalam Susantih dan Saftiana (2009) sebagaimana dalam Ambya (2023) menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menggali serta mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat. Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu indikator untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Kinerja keuangan juga mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Isnaini et al., 2023).

Intergovernmental Revenue

Intergovernmental Revenue adalah sejumlah transfer dana dari pusat dibuat untuk membiayai program-program pemerintah daerah. Menurut Novianti (2022) mengatakan bahwa *intergovernmental revenue* atau dana perimbangan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Dengan menerapkan kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah melalui dana perimbangan, tujuan adalah untuk mengurangi ketidakmampuan suatu daerah untuk membiayai pengeluaran pajak dan retribusi. Ini karena kebutuhan daerah sangat beragam.

Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1, dijelaskan bahwa belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang terhadap nilai kekayaan bersih pemerintah daerah. Selanjutnya pada Pasal 20, dijelaskan bahwa belanja daerah mencakup seluruh pengeluaran yang berasal dari rekening kas umum daerah yang menyebabkan berkurangnya ekuitas dana lancar. Pengeluaran tersebut merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diterima kembali pembayarannya oleh pemerintah daerah.

Ukuran Pemerintahan Daerah

Size (Ukuran) adalah merupakan suatu besaran yang digunakan untuk menggambarkan skala suatu entitas. Dalam konteks pemerintahan daerah, ukuran

pemerintah daerah merupakan salah satu indikator yang menunjukkan besar atau kecilnya suatu pemerintahan daerah. Ukuran tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti total aset, jumlah pegawai, total pendapatan, serta tingkat produktivitas pemerintah daerah. Dalam banyak penelitian, ukuran pemerintah daerah umumnya diproksikan melalui total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yang dinilai memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan skala yang lebih besar cenderung memiliki kapasitas operasional yang lebih luas sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis memberikan hipotesis sebagai berikut:

- $\mathbf{H_1}$ **:** *Intergovernmental Revenue* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- $\mathbf{H_2}$**:** Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- $\mathbf{H_3}$ **:** Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- $\mathbf{H_4}$ **:** *Intergovernmental Revenue*, Belanja Daerah dan Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menguji hubungan kausalitas antar variabel yang diteliti. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. Periode observasi ditetapkan selama 3 tahun, yakni mulai tahun 2022 hingga 2024, dengan data yang diperoleh melalui portal resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Populasi penelitian mencakup seluruh pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 33 entitas. Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh, seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian, sehingga menghasilkan total 99 unit observasi (33 daerah x 3 tahun).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang diproksikan melalui Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Sementara itu, variabel independen meliputi *Intergovernmental Revenue* yang diukur melalui total dana transfer, Belanja Daerah yang diukur dari total realisasi belanja, serta Ukuran Pemerintah Daerah yang diproksikan melalui nilai logaritma natural dari total aset.

Teknik analisis data dilakukan secara sistematis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan perangkat lunak SPSS 25. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, data terlebih dahulu diuji melalui serangkaian uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov (dengan pendekatan Monte Carlo), uji multikolinearitas melalui nilai VIF, uji heteroskedastisitas, serta uji autokorelasi. Mengingat sifat data yang digunakan, prosedur Cochrane-Orcutt diterapkan apabila ditemukan indikasi autokorelasi untuk memastikan model regresi yang dihasilkan bersifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan melalui uji signifikansi parsial (uji t), uji signifikansi simultan (uji F), dan analisis koefisien determinasi untuk mengetahui sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi pada kinerja keuangan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

No.	Variabel	Kabupaten/Kota	Minimum	Kabupaten/Kota	Maksimum
1	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Nias Selatan 2024	0,01504374	Kota Sibolga 2024	0,27909999
2	Intergovernmental Revenue	Kab. PakPak Barat 2022	475986038000	Kab. Simalungun 2024	2423091060000
3	Belanja Daerah	Kab. Padang Sidempuan 2022	637158214993	Kab. Simalungun 2024	2657709012036
4	Ukuran Pemerintah Daerah	Kab. Padang Sidempuan 2022	28,5965073	Kab. Simalungun 2024	29,8147581

Berdasarkan data penelitian yang diolah, kinerja keuangan pemerintah daerah (diukur dengan rasio kemandirian) menunjukkan variasi yang signifikan, dengan nilai minimum sebesar 0,015 (Kab. Nias Selatan 2024) dan maksimum 0,279 (Kota Sibolga 2024).

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		84
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.04792809
Most Extreme Differences	Absolute	.104
	Positive	.104
	Negative	-.072
Test Statistic		.104
Asymp. Sig. (2-tailed)		.026[c]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			84
Normal Parameters[a,b]	Mean		.0000000
	Std. Deviation		.04792809
Most Extreme Differences	Absolute		.104
	Positive		.104
	Negative		-.072
Test Statistic			.104
Asymp. Sig. (2-tailed)			.026[c]
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.308[d]
	95% Confidence Interval	Lower Bound	.299
		Upper Bound	.317

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 926214481.

Berdasarkan hasil pengujian normalitas dengan metode Monte Carlo diatas, bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) menunjukkan angka sebesar 0,026. Nilai ini secara teknis berada di bawah taraf signifikansi 0,05 (0,026 < 0,05). Namun, untuk memberikan kepastian statistik yang lebih kuat, peneliti merujuk pada nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) yang menunjukkan hasil sebesar 0,308.

Ketepatan hasil pengujian ini diperkuat dengan nilai 95% Confidence Interval, di mana distribusi data tetap berada pada rentang batas bawah (*Lower Bound*) sebesar 0,299 hingga batas atas (*Upper Bound*) sebesar 0,317. Seluruh rentang nilai dalam interval kepercayaan tersebut secara konsisten berada di atas nilai signifikansi 0,05. Oleh karena nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) sebesar 0,308 lebih besar dari parameter yang ditetapkan yakni 0,05 (0,308 > 0,05), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi ini memiliki nilai *residual* yang terdistribusi secara normal. Dengan demikian, asumsi normalitas dalam penelitian ini telah terpenuhi dan model dianggap memenuhi syarat untuk digunakan dalam pengujian statistika pada tahap selanjutnya

2. Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.602	1.331		3.456	.001		
	Intergovernmental Revenue	-0,000000000000008250	.000	-.612	-2.449	.017	.173	5.772
	Belanja Daerah	-0,000000000000002495	.000	-.173	-.985	.327	.350	2.861
	Ukuran Pemerintah Daerah	-127.551	37.925	-.744	-3.363	.001	.221	4.524

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada model regresi, diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) di bawah 10, yaitu berkisar 2,861 hingga 5,772. Multikolinearitas dinyatakan tidak menjadi masalah apabila nilai VIF masih berada di bawah ambang batas 10 dan nilai *tolerance* di atas 0,10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas yang serius dalam model ini. Oleh karena itu, seluruh variabel dalam model regresi dapat dinyatakan bebas dari multikolinearitas dan layak untuk digunakan dalam analisis regresi selanjutnya.

3. Uji Heterokedastisitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.217	.758		.286	.776
	Intergovernmental Revenue	-0,000000000000006746	.000	-.092	-.352	.726
	Belanja Daerah	-0,00000000000001507	.000	-.192	-1.045	.299
	Ukuran Pemerintah Daerah	-4.427	21.603	-.047	-.205	.838

a. Dependent Variable: Abs_RES

Berdasarkan tabel hasil uji glejser, diperoleh nilai signfikansi *intergovernmental revenue* sebesar 0,726, belanja daerah 0,299 dan ukuran pemerintah daerah 0,838. Seluruh nilai signifikansi > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi asumsi klasik kesamaan *varians* (homoskedastisitas) dan layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

4. Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.368[a]	.135	.103	.0488184673	.700

a. Predictors: (Constant), Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Daerah, Intergovernmental Revenue

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji autokorelasi diperoleh nilai DW hitung sebesar 0,700. Berdasarkan pada tabel Durbin-Watson dengan tingkat signifikansi 5% (α = 0,05), jumlah data (n) sebesar 84, dan jumlah variabel independen (k) sebesar 3, didapatkan nilai dU sebesar 1,7199 dan nilai dL sebesar 1,5723. Kriteria pengujian yang digunakan adalah dU < dW < 4 - dU. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai DW hitung (0,700) lebih kecil dari nilai dL (1,5723), sehingga nilai tersebut tidak berada di antara nilai dU dan nilai 4 - dU. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dinyatakan bahwa terjadi gejala autokorelasi positif pada model regresi. Oleh karena itu, dilakukan pengobatan autokorelasi menggunakan metode Cochrane-Orcutt. Hasil autokorelasi dengan metode pengobatan Cochrane-Orcutt adalah sebagai berikut:

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.314[a]	.098	.064	.03627	1.929

a. Predictors: (Constant), Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Daerah, Intergovernmental Revenue

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan tabel hasil uji autokorelasi menggunakan metode pengobatan Cochrane-Orcutt hasilnya adalah 1,5723 < 1,929. Ini berarti nilai DW berarti tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif dalam model regresi. Artinya, nilai-nilai *residual* dari model tidak saling berkaitan satu sama lain. Ini menunjukkan bahwa asumsi regresi terpenuhi, sehingga hasil analisis regresi dipercaya valid.

Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Dilihat dari hasil uji diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta 1,184 berarti jika seluruh variabel independen bernilai nol, maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah diperkirakan sebesar 1,184.
2. Nilai koefisien *intergovernmental revenue* -0,00000000000009276 berarti setiap kenaikan satu satuan pada *intergovernmental revenue*, dengan asumsi variabel lain konstan, akan meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar -0,00000000000009276 poin.
3. Nilai koefisien belanja daerah 0,00000000000001554 berarti setiap kenaikan satu satuan pada belanja daerah dengan asumsi variabel lain konstan, akan meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,00000000000001554 poin.

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	1.184	.444		2.667	.009
	Intergovernmental Revenue	-0,00000000000009276	.000	-.681	-2.677	.009
	Belanja Daerah	0,00000000000001554	.000	.145	.718	.475
	Ukuran Pemerintah Daerah	-92.192	35.787	-.534	-2.576	.012

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

4. Nilai koefisien ukuran pemerintah dearah -92,192 berarti setiap kenaikan satu satuan pada ukuran pemerintah daerah dengan asumsi variabel lain konstan, akan meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar -92,192 poin.

2. Uji Simultan (Uji F)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.184	.444		2.667	.009
	Intergovernmental Revenue	-0,00000000000009276	.000	-.681	-2.677	.009
	Belanja Daerah	0,00000000000001554	.000	.145	.718	.475
	Ukuran Pemerintah Daerah	-92.192	35.787	-.534	-2.576	.012

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.011	3	.004	2.875	.041[b]
	Residual	.104	79	.001		
	Total	.115	82			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
b. Predictors: (Constant), Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Daerah, Intergovernmental Revenue

Berdasarkan hasil uji F ANOVA, diperoleh nilai F hitung 2,875 dengan nilai signfiikansi 0,41. Nilai F tabel pada tingkat signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan pembilang (df1) = 3 dan penyebut (df2) = 80 adalah sebesar 2,72. Karena F hitung 2,875 > F tabel 2,72 dan nilai signfikansi 0,041 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan berpengaruh signfikan secara simultan. Artinya, variabel independen yang terdiri dari *Intergovernmental Revenue*, Belanja Daerah dan Ukuran Pemerintah secara bersama-sama berpengaruh signfikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Uji Parsial (Uji T)

Berdasarkan tabel di atas, hasil penelitian untuk uji parsial t adalah sebagai berikut:

1. *Intergovernmental revenue* memiliki nilai *t*-hitung sebesar -2,677 > *t*-tabel 1,990 dan nilai Sig. = 0,009 < 0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa *Intergovernmental Revenue* berpengaruh signifikan terhadap Kinerja

Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan adanya hubungan berlawanan arah, dimana peningkatan ketergantungan terhadap dana transfer pusat cenderung menurunkan tingkat kemandirian kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

2. Belanja daerah memiliki nilai *t*-hitung sebesar 0,718 < *t*-tabel 1,990 dan nilai Sig. = 0,475 > 0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa Belanja Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kinerja keuangan pada periode pengamatan tahun 2022-2024.
3. Ukuran pemerintah daerah memiliki nilai nilai *t*-hitung sebesar -2,576 > *t*-tabel 1,990 dan nilai Sig. = 0,012 < 0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan adanya hubungan berlawanan arah. Artinya, setiap peningkatan pada ukuran pemerintah daerah maka akan diikuti oleh penurunan rasio kinerja keuangan daerah.

Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

No.	Hipotesis	Hasil Uji
H_1	*Intergovernmental Revenue* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	Diterima
H_2	Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	Ditolak
H_3	Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	Diterima
H_4	*Intergovernmental Revenue*, Belanja Daerah dan Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	Diterima

4. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.314[a]	.098	.064	.03627

a. Predictors: (Constant), Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Daerah, Intergovernmental Revenue
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang ditampilkan pada tabel di atas, nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh adalah sebesar 0,064. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yang terdiri dari *intergovernmental revenue*, belanja daerah dan ukuran pemerintah daerah secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen, yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 6,4%. Dengan kata lain, sekitar 6,4% perubahan atau variasi dalam kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan sisanya 93,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan (H1)

Secara parsial, *Intergovernmental Revenue* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Temuan ini mengonfirmasi adanya ketergantungan fiskal yang tinggi, di mana besarnya dana transfer justru menurunkan rasio kemandirian daerah. Kondisi ini mencerminkan fenomena *flypaper effect*, di mana pemerintah daerah cenderung mengandalkan bantuan pusat dibandingkan mengoptimalkan penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan (H2)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi belanja yang dilakukan selama periode 2022-2024 belum mampu menstimulus peningkatan kemandirian fiskal secara langsung. Diduga, struktur belanja masih didominasi oleh

pengeluaran rutin yang bersifat konsumtif, sehingga belum memberikan dampak multiplikasi terhadap penguatan sumber-sumber pendapatan daerah.

3. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan (H3)

Ukuran Pemerintah Daerah terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Sebagai entitas yang memiliki aset besar, ukuran pemerintah mencerminkan kompleksitas dan kapasitas dalam pengelolaan sumber daya. Skala entitas yang lebih besar menuntut tata kelola yang lebih akuntabel, di mana pemanfaatan aset yang optimal dapat menjadi daya dukung dalam menjaga stabilitas kinerja keuangan daerah di tengah fluktuasi ekonomi.

4. Pengaruh Simultan *Intergovernmental Revenue*, Belanja Daerah, dan Ukuran Pemerintah Daerah (H4)

Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal yang berasal dari pusat, alokasi pengeluaran daerah, serta skala aset entitas secara bersama-sama merupakan determinan penting yang membentuk potret kemandirian dan efektivitas keuangan daerah.

KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui "Pengaruh *Intergovernmental Revenue*, Belanja Daerah dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022-2024)". Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial, dinyatakan bahwa *Intergovernmental Revenue* memiliki nilai *t*-hitung sebesar -2,677 > *t*-tabel 1,990 dan nilai Sig. = 0,009 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa *Intergivernmental Revenue* berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan adanya hubungan berlawanan arah, dimana peningkatan ketergantungan terhadap dana transfer pusat cenderung menurunkan tingkat kemandirian kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

2. Secara parsial, dinyatakan bahwa Belanja Daerah memiliki nilai *t*-hitung sebesar 0,718 < *t*-tabel 1,990 dan nilai Sig. = 0,475 > 0,05. Maka dapat simpulkan bahwa Belanja Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa alokasi belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum mampu secara langsung meningkatkan efektivitas atau efisiensi kinerja keuangan secara keseluruhan. Dengan kata lain, alokasi belanja daerah belum dilakukan secara optimal dan efisien untuk mendongkrak rasio kemandirian keuangan
3. Secara simultan, ditemukan bahwa *Intergovernmental Revenue*, Belanja Daerah dan Ukuran Pemerintah Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini didasarkan pada nilai F-hitung sebesar 2,875 > F-tabel 2,72 dan nilai Sig. 0,041 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan berpengaruh signifikan secara simultan.

SARAN

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

   Pemerintah daerah perlu memprioritaskan peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mengurangi ketergantungan yang tinggi terhadap *Intergovernmental Revenue* (dana transfer) yang terbukti berpengaruh signifikan namun memberikan tekanan pada kinerja keuangan. Selain itu, mengingat variabel Belanja Daerah tidak menunjukkan berpengaruh dalam penelitian ini, pemerintah daerah disarankan untuk melakukan restrukturisasi alokasi belanja dengan mengalihkan fokus dari belanja operasional yang bersifat konsumtif ke arah belanja modal yang lebih produktif, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan aset (Ukuran Pemerintah Daerah) agar besarnya skala organisasi tidak menjadi beban yang justru menurunkan kualitas kinerja keuangan daerah.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian dengan mengintegrasikan variabel-variabel baru yang lebih kompleks, seperti Opini Audit, Tingkat *Leverage*, atau variabel non-keuangan seperti transparansi dan implementasi *e-government*, mengingat nilai koefisien determinasi *(R-Square*)

dalam model ini masih relatif kecil. Selain itu, penggunaan periode pengamatan yang lebih panjang (*longitudinal*) serta penerapan variabel moderasi atau mediasi sangat disarankan untuk menggali lebih dalam alasan di balik tidak berpengaruhnya variabel belanja terhadap kinerja keuangan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan memiliki tingkat generalisasi hasil yang lebih tinggi bagi tata kelola keuangan publik di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Amanda, C. D., & Praptoyo, S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *12*(5), 1–17. https://doi.org/https://share.google/kq4s59OuyG0SsVEuP

Desky, D. A., Erlina, & Sirojuzilam. (2023). Pengaruh Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *Jurnal Trias Politika*, *7*(1), 47–60. https://doi.org/https://doi.org/10.33373/jtp.v7i1.5064

Dewanti, A. C. (2022). *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Ukuran Legislatif dan Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun Anggaran 2016-2020*. Politeknik Negeri Sriwijaya.

Dilliana, S. M., & Herdi, H. (2022). *Manajemen Keuangan Daerah* (D. Winarni (ed.); 1st ed.). CV. Eureka Media Aksara.

Fadilah, A. F., & Andriani, S. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, *23*(1), 179–198. https://doi.org/https://doi.org/10.24167/jab.v23i1.13363

Fauziah, N. N., Zakaria, S., Yunita, D., & Program. (2023). Analisis Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) pada Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2021. *Jurnal Administrasi Pemenrintahan (Janitra)*, *3*(2), 368–377. https://doi.org/https://doi.org/10.24198/janitra.v3i2.52905

Isnaini, N. F., Armin, R., & Dwi, A. (2023). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Jawa Timur. *Bisman: The Journal of Business and Management*, *6*(1), 159–173. https://doi.org/https://doi.org/10.37112/bisman.v6i1.2499

Novianti, M. (2022). *Pengaruh Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode 2015-2020)* [Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjung Pinang]. https://repo.stie-pembangunan.ac.id/id/eprint/1920

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Putri, S. P. (2023). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *JESYA : Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, *6*(2), 2068–2082. https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1230 Anggaran

Saraswati, S. A., Inayati, N. I., Setyadi, E. J., & Dirgantari, N. (2024). Analisis Kinerja Keuangan: Bukti Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY Tahun 2020-2022. *FINANCIAL: Jurnal Akuntansi Published*, *10*(2), 275–293. https://doi.org/https://doi.org/10.37403/financial.v10i2.610